



PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN IV TAHUN **2024**

PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TRIWULAN IV TAHUN 2024
(Periode Survei bulan Oktober - Desember)

berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
pada hari Selasa, 31 Desember 2024



Top Management,

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survei,

Benny Hardiyanto, S.H.

Ketua Tim Survei,

H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama pada Triwulan IV Tahun 2024 (periode survei bulan Oktober – Desember) dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 sekaligus menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 4 April 2023 Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi. Kepuasan penerima layanan dalam hal tingkat persepsi korupsi dapat dijelaskan/ diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Demikian laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Surabaya, 31 Desember 2024

Ketua Tim Survei,

H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Guna mengukur tingkat persepsi korupsi dalam pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024 (Periode Survei bulan Oktober – Desember). Pelaksanaan survei ini merupakan wujud kepatuhan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Laporan survei ini memuat hasil evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap 86 responden yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi 5 (lima) indikator, antara lain:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95;
- b. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,94;
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,93;
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,97;
- e. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,93.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dalam persepsi korupsi Triwulan IV Tahun 2024, didapati nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,94 atau nilai interval konversi sebesar 98,60 yang tergolong dalam kategori mutu pelayanan A (bersih dari korupsi). Melalui hasil survei ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I KUESIONER SURVEI	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	5
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	9
A. Analisis Hasil Survei	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	19
BAB IV DATA SURVEI	21
A. Data Responden	21
B. Data dukung Lainnya	33
BAB V PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Rekomendasi	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie	6
Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi	8
Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	9
Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	11
Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur	12
Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku	14
Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	15
Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara.....	16
Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024	18
Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	18
Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	22
Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan	28
Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	10
Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	11
Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	12
Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/	14
Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	15
Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	17
Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	28
Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	32

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	33

BAB I KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu bentuk komitmennya berupa pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024 (Periode Survei bulan Oktober – Desember) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berupaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya untuk dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, serta telah terbebas dari praktik korupsi, yang diantaranya dapat dilihat dari potensi pelaksanaan suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

B. Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan perundangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan dan layanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Menilai efektifnya program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
5. Membantu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengevaluasi dan menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas

institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini, antara lain:

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersih, akuntabel, dan transparan;
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai yang diharapkan oleh pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta anti gratifikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

F. Manfaat

Dengan tersedianya data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat:

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur/ indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; dan
4. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Unsur/ Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang memuat 5 (lima) unsur/ indikator, antara lain mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.

H. Kuesioner Survei

Kuesioner survei yang disusun untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sebagai berikut:

1. Bagian I: Identitas Responden, meliputi

- a. Nama responden;
- b. Nomor ponsel responden;
- c. Jenis kelamin;
- d. Usia;
- e. Pekerjaan;
- f. Pendidikan; dan
- g. Jenis layanan

2. Bagian II: Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan survei ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner *online* melalui *link* <https://survei.badilag.net/> terdiri dari 5 (lima) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan (nilai 1 – 6) yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Diberi nilai 1 (tidak sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- b. Diberi nilai 2 (tidak jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- c. Diberi nilai 3 (kurang jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan ada namun belum jelas arah alurnya sehingga prosesnya tidak efektif;
- d. Diberi nilai 4 (kurang efektif), jika pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum memuaskan sehingga prosesnya belum efektif;
- e. Diberi nilai 5 (sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit namun masih perlu diefektifkan; dan
- f. Diberi nilai 6 (sangat sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat memuaskan, sangat sederhana sehingga prosesnya mudah dan efektif.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi kriteria survei, yaitu satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan masyarakat/ *stakeholder* yang mendapatkan manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan jenis layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:

1. Layanan pembinaan dan pengawasan;
2. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.

Kriteria responden yang diambil mencakup variasi yang cukup dari karakteristik masyarakat, seperti jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan guna memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili seluruh pengguna dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel pada pengukuran ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang meliputi aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan, permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan/ perantara.

Deskripsi kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei ini menggunakan tabel Morgen dan Krejcie sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krejcie

Tabel Morgan & Krejcie					
Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

Sementara teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Dengan demikian, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dihitung melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses melalui alamat [link https://survei.badilag.net/](https://survei.badilag.net/) dengan menggunakan “nilai rata-rata” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana rumus berikut:

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{\text{Jumlah responden} \times 30} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{4} \times 100\%$$

2. Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala Likert dengan penilaian antara 1 – 6, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi terendah (tidak sesuai), sementara nilai 6 merupakan skor persepsi tertinggi (sangat sesuai) dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani (semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan).

Metode analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas pertanyaan survei.

Adapun nilai interval persepsi kualitas pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

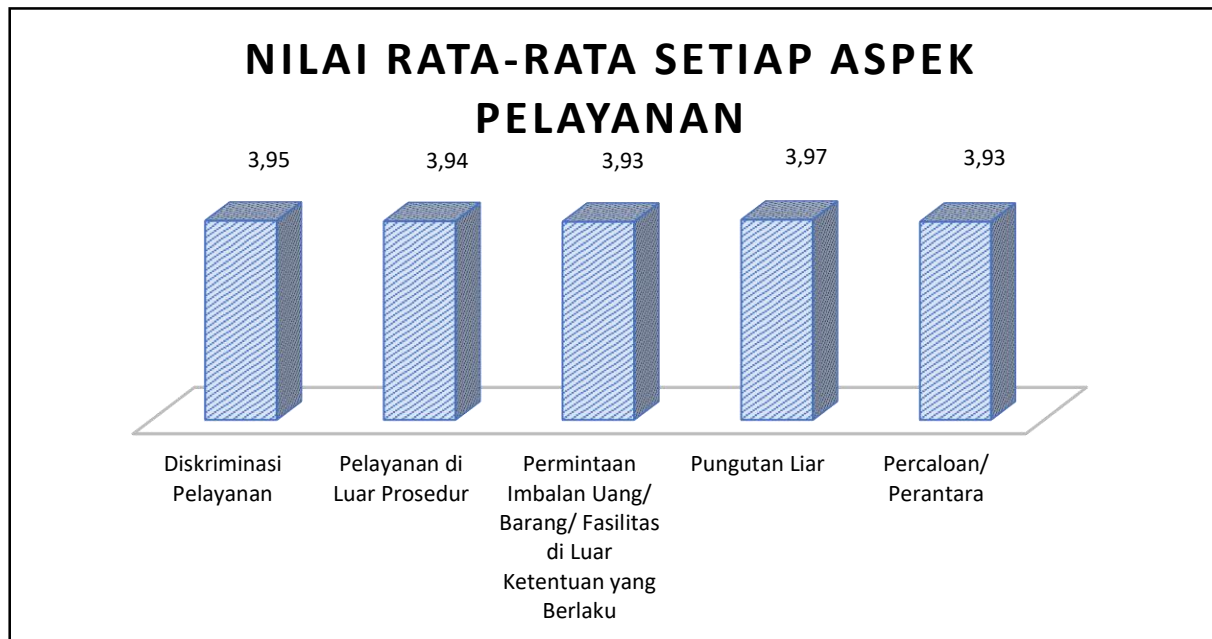
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 86 responden. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,94 dengan nilai konversi sebesar 98,60 dan berada pada kategori **"SANGAT BAIK"**. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variabel penilaian. Adapun nilai rata-rata setiap aspek pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Unsur Pertanyaan		Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,95	Bersih dari Korupsi (A)	2
U2	Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,94	Bersih dari Korupsi (A)	3
U3	Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3,93	Bersih dari Korupsi (A)	4
U4	Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,97	Bersih dari Korupsi (A)	1
U5	Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,93	Bersih dari Korupsi (A)	5
Rata-rata Tertimbang		3,94	Sangat Baik (A)	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur pelayanan, terdapat unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan sangat baik, yaitu pungutan liar. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan paling rendah, yaitu (1) permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku dan (2) percaloan/ perantara. Di bawah ini merupakan analisis data hasil masing-masing aspek pelayanan dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

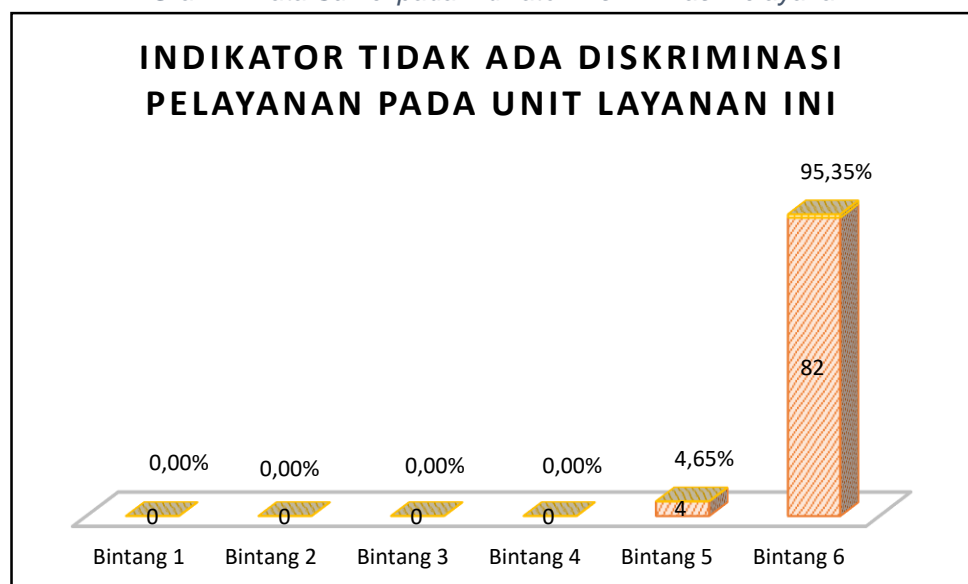
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	4	4,65%
★ ★ ★ ★ ★ ★	82	95,35%
Jumlah	86	100,00%
Indeks		3,95

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,95. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 82 responden (95,35%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa petugas layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Selain itu, sejumlah 4 responden (4,65%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/ prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

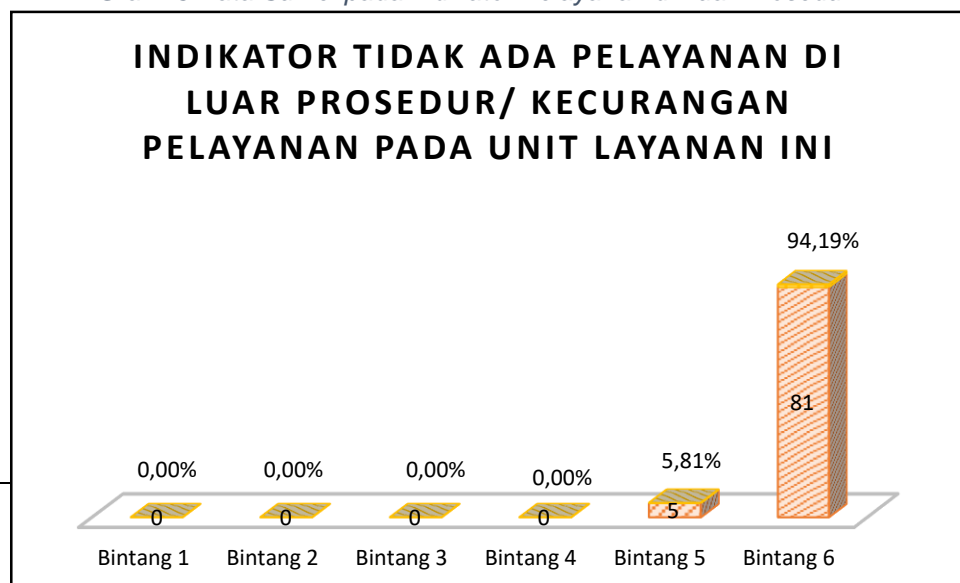
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	5	5,81%
★ ★ ★ ★ ★ ★	81	94,19%
Jumlah	86	100,00%
Indeks		3,94

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,94. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 81 responden (94,19%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sejumlah 5 responden (5,81%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak adanya kecurangan pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/ jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll) di luar ketentuan. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

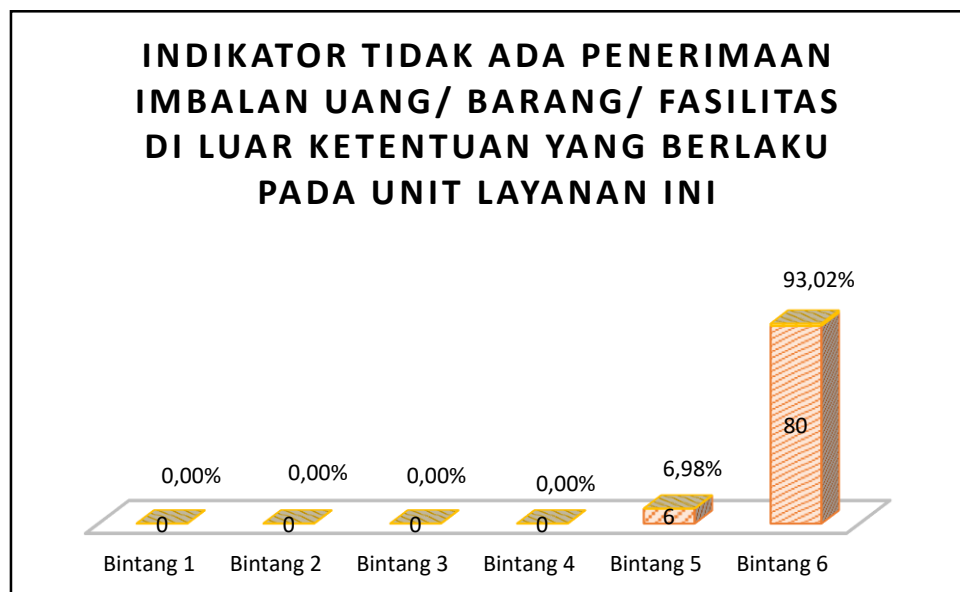
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	6	6,98%
★ ★ ★ ★ ★ ★	80	93,02%
Jumlah	86	100,00%
Indeks		3,93

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini berada pada angka 3,93. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 80 responden (93,02%) memberikan skor bintang 6 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 6 responden (6,98%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak ada

imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih perlu ditingkat lagi.

4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli) bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

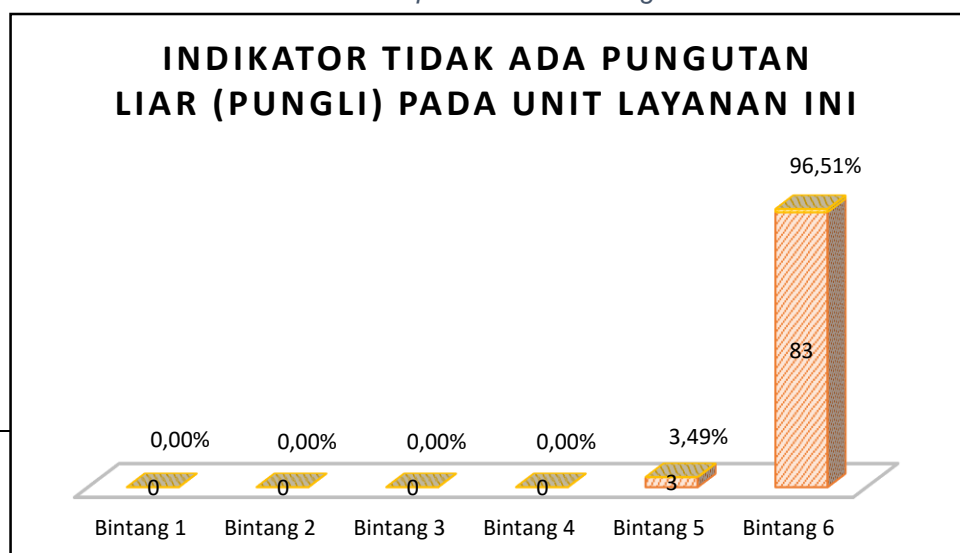
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	3	3,49%
★ ★ ★ ★ ★ ★	83	96,51%
Jumlah	86	100,00%
Indeks		3,97

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,97. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 83 responden (96,51%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 3 responden (3,49%) memberikan skor bintang 5 yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden belum sepenuhnya setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Informasi ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan yang dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

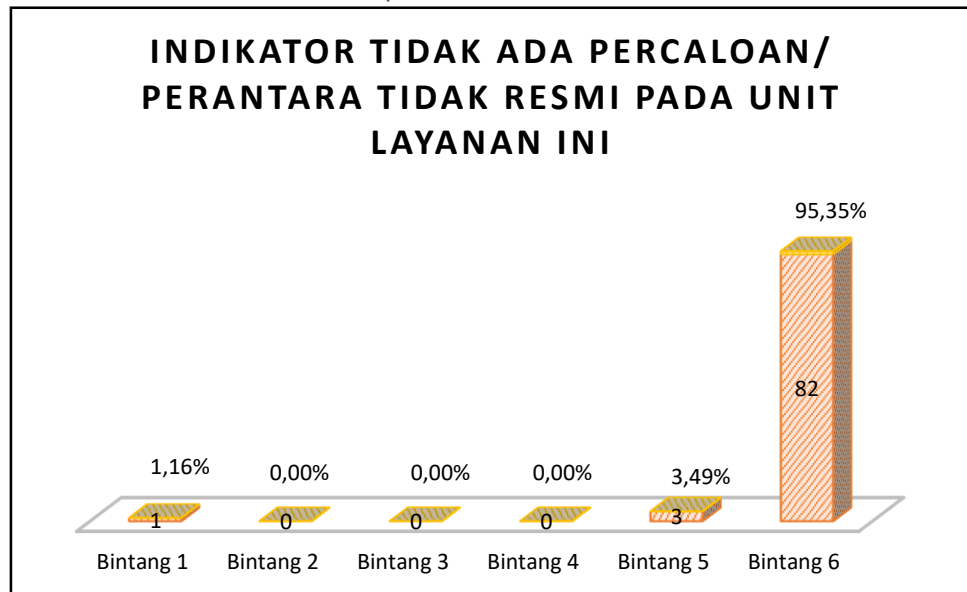
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tarif/ biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/ biaya yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	1	1,16%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	3	3,49%
★ ★ ★ ★ ★ ★	82	95,35%
Jumlah	86	100,00%
Indeks		3,93

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,93. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 82 responden (95,35%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu, sejumlah 3 responden (3,49%) memberikan skor bintang 5 yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan. Sementara 1 responden (1,16%) memberikan skor bintang 1 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan IV Tahun 2024 (periode survei bulan Oktober – Desember) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai SPAK	3,94 dengan nilai konversi 98,60
2	Kategori	Bersih dari Korupsi
3	Unsur Terendah	U3: Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku U5: Percaloan/ Perantara
4	Unsur Tertinggi	U4: Pungutan Liar
5	Prioritas Perbaikan	U3: Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku U5: Percaloan/ Perantara

Guna memotivasi dan memperbaiki kinerja pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka masukan/ opini/ pandangan masyarakat/ *stakeholder* sangat diperlukan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat/ *stakeholder*. Masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1	Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sangat luar biasa dengan adanya e-Binwas, arahan dari PTA sangat membantu dalam penyelesaian tugas-tugas melalui Aplikasi e-Binwas
2	Pelayanan sudah sangat baik, semoga bisa dipertahankan
3	Tingkatkan dan pertahankan
4	Pembinaan dan pengawasan dr pengadilan tinggi agama surabaya sangat efektif dan telah berjalan dengan baik
5	Pertahankan kualitas pelayanan dan semoga sukses, kompak selalu PTA Surabaya
6	Tingkatkan selalu pelayanan yang baik dan berkualitas
7	Untuk layanan informasi dan pengaduan agar lebih ditingkatkan kualitasnya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
8	Tetap jaga integritas demi terwujudnya badan peradilan yang agung
9	Tetap konsisten
10	Kegiatan pembinaan dan pengawasan dari PTA Surabaya sangat efektif untuk meningkatkan kinerja satker

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan IV Tahun 2024 (periode survei bulan Oktober – Desember) didapatkan hasil survei sebesar 98,60 dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,94 yang termasuk dalam kategori “**BERSIH DARI KORUPSI**”. Dari 5 (lima) unsur/ indikator, terdapat nilai unsur tertinggi, yaitu pada unsur pungutan liar dengan nilai 3,97 sementara unsur permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku dan percaloan/ perantara memperoleh nilai unsur terendah, yaitu sebesar 3,93.

Meskipun sebagian besar responden memberikan skor dan rata-rata yang tinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), namun terdapat beberapa catatan analisis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan layanan agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin optimal dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat terus meningkat.

Tindak lanjut tersebut juga diperlukan guna mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang salah satu arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), antara lain:

1. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan, terutama pada aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan; dan
3. Evaluasi terhadap dokumentasi tertulis atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan layanan dengan prosedur yang ditetapkan.

Setelah melakukan tindak lanjut, pihak unit layanan harus memantau dan mengevaluasi kembali kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, tindak lanjut

hasil survei harus melibatkan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Responden ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan IV Tahun 2024 (periode survei bulan Oktober – Desember) diikuti oleh 86 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun data dari para responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan IV Tahun 2024 (periode survei bulan Oktober – Desember), sebagai berikut:

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag

survei.badilag.net/home/response

SURVELAG Dashboard Survei

Survei
Halaman 1 Survei

SI SURTI (SISTEM SURVEI TERINTEGRASI)

Layanan
Layanan yang diberikan

Data Responden
Nama serta data diri responden

Form Kuisioner
Isian Form Kuisioner Survei

Kritik & Saran
Kritik dan saran anda

Identitas Responden
Kami menjamin kerahasiaan data pribadi anda

Nama Responden

NIK (Nomor Identitas)

Nomor Ponsel Responden
contoh : 08xxx

Email

Jenis Kelamin
Pilih Jenis Kelamin

Usia
Pilih usia

Pekerjaan
Pilih pekerjaan

Pendidikan
Pilih pendidikan

☐ Bahwa saya mengisi data ini dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

[< Kembali](#) [Selanjutnya >](#)

Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
1	Alfian	08*****1122	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan pembinaan dan pengawasan
2	Radik Kriolampah, S.Kom.	08*****3352	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
3	Riky Yohana, S.E., M.H.	08*****0637	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
4	Lilik Insiyati, S.Ag.	08*****7582	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
5	Amir Hamzah, S.H.	08*****4909	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
6	H. Mihdar, S.Ag., M.H.	08*****2314	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
7	Laili Hidayati	08*****9104	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
8	Taufiq Rahman Effendi	0*****0018	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
9	Heru Dwi Susanto	0*****0051	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
10	Farhan Hidayat	0*****9235	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
11	Syamsudl Dluha	08*****7001	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
12	Rachmad Firman Kristanto	08*****1937	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
13	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	08*****3147	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
14	Ahmad Muhammad Nuruzzaman Afifi, S.E.	08*****4678	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
15	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.	08*****9198	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
16	Moch. Ali, S.H., M.H.	08*****7910	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
17	Fuad, S.H.I., M.H.	08*****2006	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
18	Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H.	08*****8743	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
19	Anendya Dewi Ratih, S.Kom.	08*****8585	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
20	Tri Anita Budi Utama, S.H.	08*****9450	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
21	H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.	08*****1711	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
22	Merinta Prameswari, S.A.	08*****2331	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
23	Drs. Sutipno	08*****5977	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
24	Junaidi Syampurno	08*****2247	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
25	Enggar Bagus Saputro, S.Kom.	08*****7933	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
26	Febry Emawan Dewata, S.H.,M.H.	08*****0011	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
27	Mashar, S.H.	08*****4225	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
28	Imdad, S.H.I., M.H.	08*****1236	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
29	Emma Fatmala, S.Kom., M.H.	08*****2837	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
30	Yulis Achmad Nur, S.H.I.	08*****6694	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan penyelesaian perkara
31	Fathul Mubin, S.H.I.	08*****2599	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
32	Hilmy Azy Nurmansyah, S.H.	08*****2058	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
33	Farida Pitaloka, A.Md.	08*****1229	Akademi/ Diploma	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
34	Abdul Kodir, S.Ag., M.M.	08*****5331	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
35	Syaiful Arifin, S.H.	08*****4980	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
36	Ana Khoirotul Aini, S.H.	08*****6659	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
37	Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H.	08*****3197	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
38	Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.	08*****1401	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
39	Achmad Walif Rizqy, S.H.	08*****1345	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
40	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	08*****5433	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
41	Khusnul Aini, S.H., M.H.	08*****5582	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
42	Anisah Ayu Kristianti	08*****3440	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Lainnya	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
43	Ayu Wulandari	08*****9159	Strata-3 (S3)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
44	Moch. Afif Afandi, S.Kom.	08*****3917	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
45	Heru Santoso, S.H.I.	08*****5252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
46	Irawan Mahardika, S.Kom., M.H.	08*****9680	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
47	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	08*****4177	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
48	Novan Yahya Utama, S.Kom.	08*****7946	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
49	Muhammad Nafi, S.H., M.H.I.	08*****0056	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
50	Yunistira Fauziyah, S.H.I., M.H.	08*****0491	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
51	Yeti Rianawati, S.H., M.H.	08*****0543	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
52	Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.	08*****7778	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
53	Ricky Rizki Rahmawan, S.H.	08*****8807	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
54	Ivana Rantansari, S.A.P.	08*****9196	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
55	Mohammad Nidzam Fickry, S.H.	08*****0248	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
56	Yusuf Bachtiar, S.E.I.	08*****6734	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
57	Nurlailia Isnawati, S.Akun.	08*****6016	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
58	Muhamad Taufik Hidayat	08*****8939	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan penyerahan produk pengadilan
59	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	08*****7886	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
60	Atiqotul Maula Alfariyah, S.Ag., M.H.	08*****9250	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
61	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	08*****6771	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
62	Wawan	08*****7698	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
63	Shoheh, S.H.	08*****3026	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
64	Eka Bakti Yani, S.Pd., S.H.	08*****4625	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
65	Tedy Agastya Dwi Permana, S.Kom.	08*****3213	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
66	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.	08*****4009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
67	Sandhy Sugijanto, SE., S.H.	08*****2900	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
68	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
69	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
70	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
71	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
72	Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.	08*****6689	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
73	Ridho Firmansyah, S.H., M.H.	08*****0028	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
74	Hans Zulkarnaen Nainggolan, S.Kom.	08*****0820	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
75	Misbakhul Anwar	08*****5969	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Dosen	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
76	Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.	08*****0998	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
77	Sugiarto, S.H.	*****8488	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
78	Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.	08*****0018	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
79	Maria Stefanny	--	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Karyawan Swasta	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
80	Nurhamid	08*****6911	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan penyelesaian perkara
81	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	08*****6771	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
82	Reni	08*****3573	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Karyawan BUMN	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
83	Makhmud, S.Ag., M.H.	08*****2896	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
84	Nina	08*****0638	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Mengurus Rumah Tangga	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
85	Zainal Arifin	08*****1560	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
86	Roikhan Wirda	08*****2309	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Karyawan BUMN	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan

1. Jenis Layanan

Pada periode triwulan IV ini, sebagian besar responden adalah responden yang menggunakan layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan sejumlah 37 orang (43,02%). Disusul dengan layanan pembinaan dan pengawasan sejumlah 27 orang (31,40%), layanan penyelesaian perkara sejumlah 14 orang (16,28%), dan layanan penyerahan produk pengadilan sejumlah 8 orang (9,30%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persentase
1	Layanan pembinaan dan pengawasan	27 orang	31,40%
2	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	37 orang	43,02%
3	Layanan penyelesaian perkara	14 orang	16,28%
4	Layanan penyerahan produk pengadilan	8 orang	9,30%
Jumlah		86 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

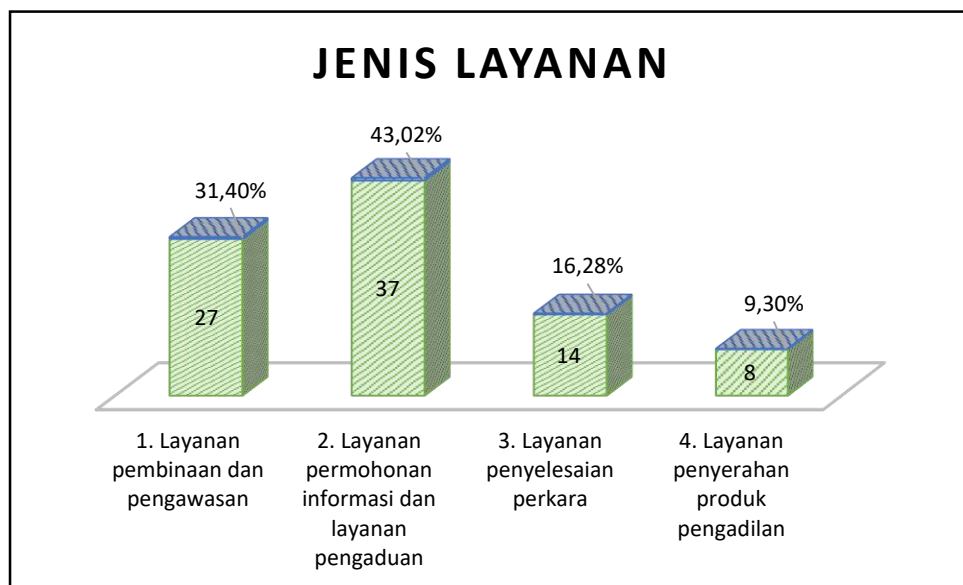
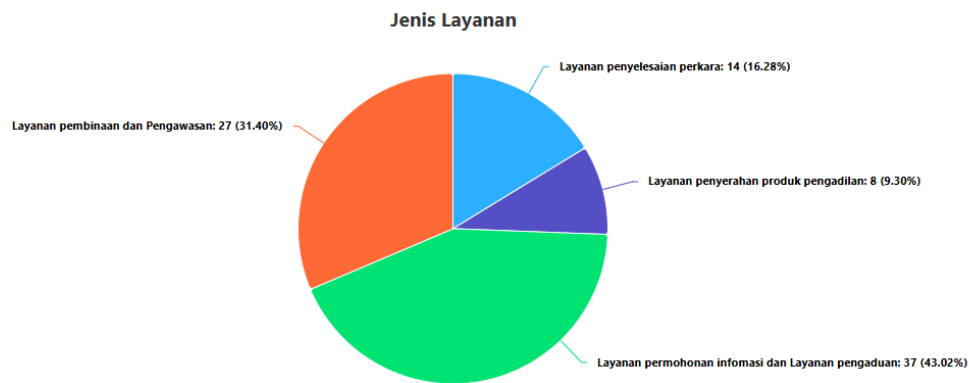


Diagram 1 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan



Highcharts.com

Jenis Layanan	
Jenis Layanan	Jumlah Responden
Layanan penyelesaian perkara	14
Layanan penyerahan produk pengadilan	8
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	37
Layanan pembinaan dan Pengawasan	27

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 62 orang (72,09%) dan sisanya perempuan sejumlah 24 orang (27,91%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	63 orang	73,26%
2	Perempuan	23 orang	26,74%
Jumlah		86 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

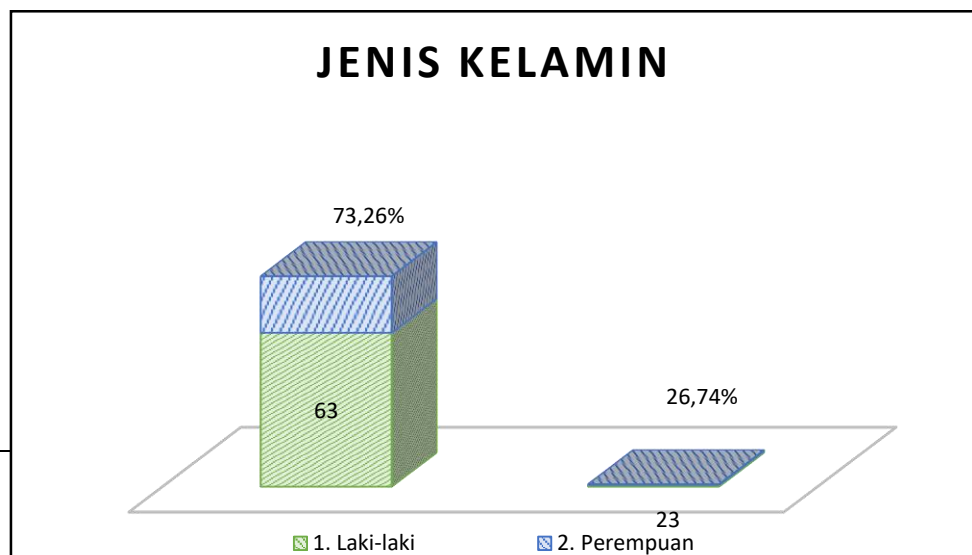
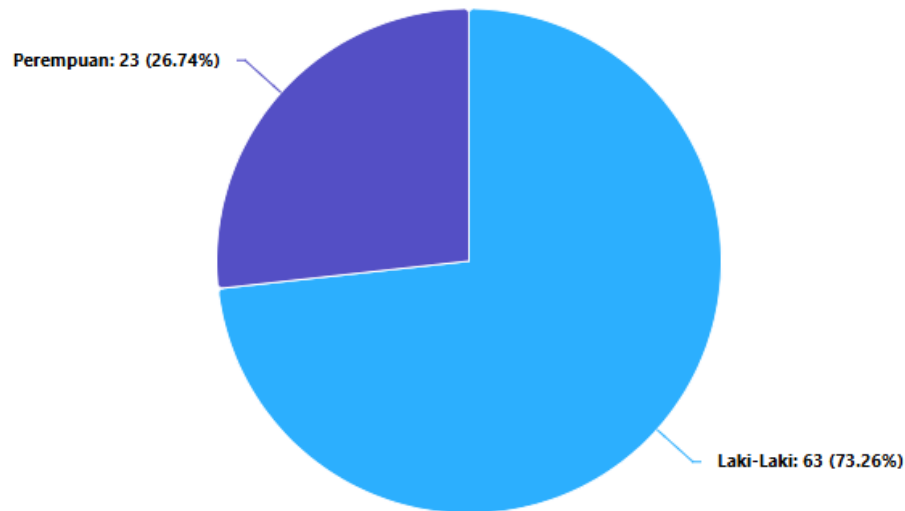


Diagram 2 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin



Jenis Kelamin	
Jenis Kelamin	Total
Laki-Laki	63
Perempuan	23

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berpendidikan Diploma IV/ Strata-1 (S1), yaitu sejumlah 45 orang (52,33%). Disusul dengan responden Strata-2 (S2) sejumlah 32 orang (37,21%), Strata-3 (S3) sejumlah 6 orang (6,98%), SMA/ SMK sederajat sejumlah 2 orang (2,33%), dan Akademi/ Diploma sejumlah 1 orang (1,16%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Strata-3 (S3)	6 orang	6,98%
2	Strata-2 (S2)	32 orang	37,21%
3	Strata-1 (S1)	45 orang	52,33%
4	Diploma (D1/D2/D3)	1 orang	1,16%
5	SLTA/ SMA/ Sederajat	2 orang	2,33%
Jumlah		86 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

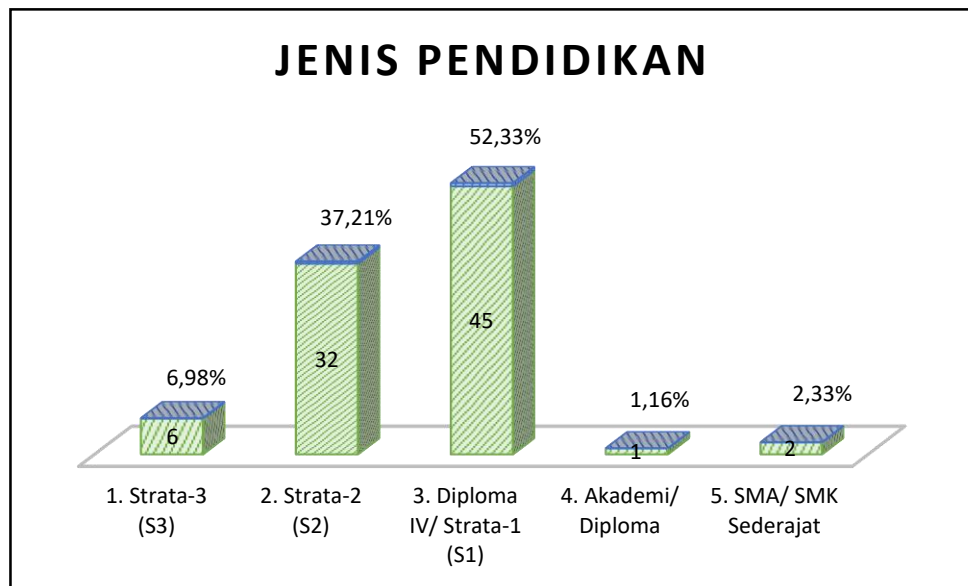
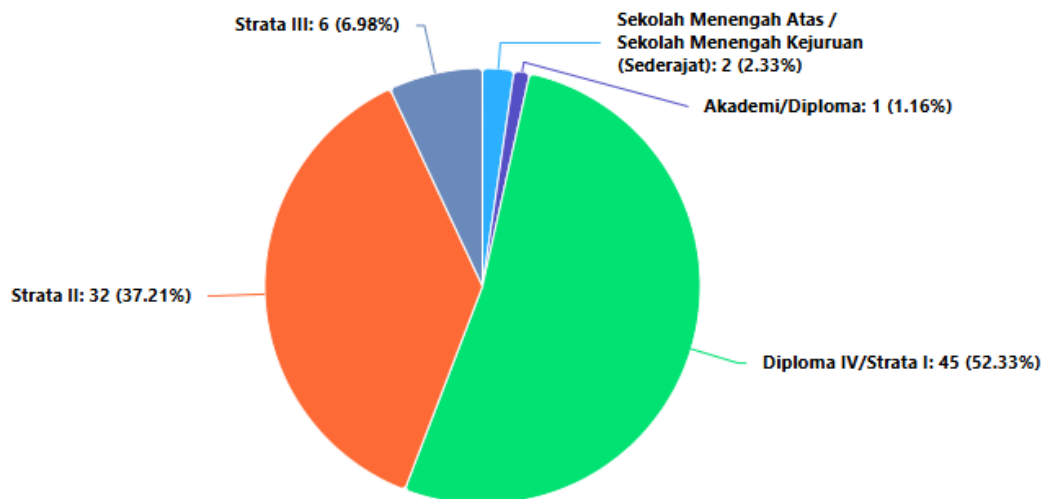


Diagram 3 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan



Highcharts.com

Tingkat Pendidikan	
Tingkat Pendidikan	Total
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	2
Akademi/Diploma	1
Diploma IV/Strata I	45
Strata II	32
Strata III	6

4. Pekerjaan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 75 orang (87,21%), karyawan honorer dan swasta masing-masing sejumlah 3 orang (3,49%). Disusul dengan responden yang berprofesi sebagai karyawan BUMN sejumlah 2 orang (2,33%). Selain itu, profesi dosen, mengurus rumah tangga, dan lainnya masing-masing sejumlah 1 orang (1,16%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	75 orang	87,21%
2	Karyawan honorer	3 orang	3,49%
3	Karyawan swasta	3 orang	3,49%
4	Karyawan BUMN	2 orang	2,33%
5	Dosen	1 orang	1,16%
6	Mengurus Rumah Tangga	1 orang	1,16%
7	Lainnya	1 orang	1,16%
Jumlah		86 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

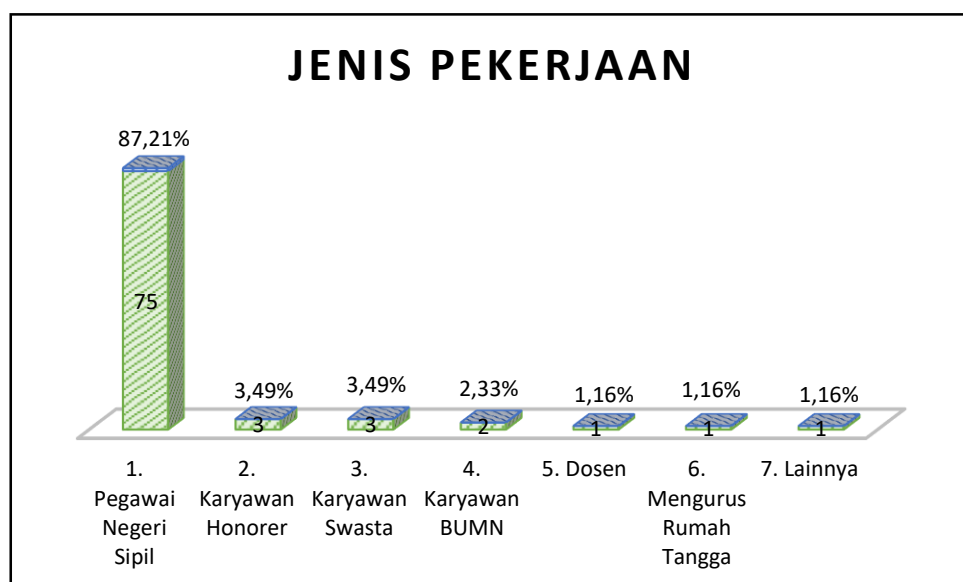


Diagram 4 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Highcharts.com

Pekerjaan	
Pekerjaan	Total
Mengurus rumah tangga	1
Pegawai Negeri Sipil	75
Karyawan swasta	3
Karyawan BUMN	2
Karyawan Honorer	3
Dosen	1
Lainnya	1

B. Data dukung Lainnya

Berikut ini dilampirkan data dukung lainnya berupa tangkapan layar pada aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

DATA UNSUR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode Triwulan 4 Tahun 2024

Total Responden : 86 INDEKS : 3.94

Copy CSV Excel Print

NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.95	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.94	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.93	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.97	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini	3.93	Sangat Baik (A)

STATISTIK SURVEI

Periode Triwulan 4 Tahun 2024

<p>86</p> <p>Data Responden</p>	<p>3.88</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>3.9</p> <p>Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan</p>	<p>3.94</p> <p>Indeks Persepsi Anti Korupsi</p>
--	--	---	--

Data Detail Hasil Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
1	6	6	6	6	6	4
2	6	6	6	6	6	4
3	6	6	6	6	6	4
4	6	6	6	6	6	4
5	6	6	6	6	6	4
6	6	6	6	6	6	4
7	6	6	6	6	6	4
8	6	6	6	6	6	4
9	6	6	6	6	6	4
10	6	6	6	6	6	4
11	6	6	6	6	6	4
12	6	6	6	6	6	4
13	6	6	6	6	6	4
14	6	6	6	6	6	4
15	6	6	6	6	6	4
16	6	6	6	6	6	4
17	6	5	6	6	1	3,2
18	6	6	6	6	6	4
19	6	6	6	6	6	4
20	6	5	6	6	6	3,8
21	6	6	6	6	6	4
22	6	6	6	6	6	4
23	6	6	6	6	6	4
24	6	6	6	6	6	4
25	6	6	6	6	6	4
26	6	6	6	6	6	4
27	6	6	6	6	6	4
28	6	6	6	6	6	4
29	6	6	6	6	6	4
30	6	6	6	6	6	4
31	6	6	6	6	6	4
32	6	6	6	6	6	4
33	6	6	6	6	6	4
34	6	6	6	6	6	4
35	6	6	6	6	6	4
36	6	6	6	6	6	4
37	6	6	6	6	6	4
38	6	6	6	6	6	4
39	6	6	6	6	6	4
40	6	6	6	6	6	4
41	6	6	6	6	6	4
42	6	6	6	6	6	4
43	6	6	5	6	6	3,8
44	6	6	6	6	6	4
45	6	6	5	6	6	3,8
46	6	6	6	6	6	4
47	6	6	6	6	6	4
48	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
49	6	6	6	6	6	4
50	6	6	6	6	6	4
51	6	6	6	6	6	4
52	6	6	6	6	6	4
53	6	6	6	6	6	4
54	6	6	6	6	6	4
55	6	6	6	6	6	4
56	6	6	6	6	6	4
57	6	6	6	6	6	4
58	5	5	5	5	5	3
59	6	6	6	6	6	4
60	6	6	6	6	6	4
61	6	6	6	6	6	4
62	5	5	5	5	5	3
63	6	6	6	6	6	4
64	6	6	6	6	6	4
65	5	6	5	6	6	3,6
66	6	6	6	6	6	4
67	6	6	6	6	6	4
68	6	6	6	6	6	4
69	5	6	6	6	6	3,8
70	6	5	5	6	6	3,6
71	6	6	6	6	5	3,8
72	6	6	6	6	6	4
73	6	6	6	6	6	4
74	6	6	6	6	6	4
75	6	6	6	6	6	4
76	6	6	6	6	6	4
77	6	6	6	6	6	4
78	6	6	6	6	6	4
79	6	6	6	6	6	4
80	6	6	6	6	6	4
81	6	6	6	6	6	4
82	6	6	6	5	6	3,8
83	6	6	6	6	6	4
84	6	6	6	6	6	4
85	6	6	6	6	6	4
86	6	6	6	6	6	4
Total	512	511	510	513	508	-
Jumlah Kuesioner	86	86	86	86	86	-
Rata - rata	3,95	3,94	3,93	3,97	3,93	-
Rata-rata x Bobot	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	-
Nilai Rata-rata Tertimbang						3,94
IPAK Unit Pelayanan						98,60

Kesimpulan:

Nilai IPAK setelah dikonversi : 98,60

Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih Dari Korupsi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan 86 responden yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki indeks persepsi anti korupsi, yaitu 3,94 atau 98,60 dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut terdiri dari 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95;
2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,94;
3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,93;
4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,97;
5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,93.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan IV Tahun 2024 (periode survei bulan Oktober – Desember) di atas menunjukkan bahwa mayoritas memiliki indeks di atas 3,95 atau masuk pada mutu "**BERSIH DARI KORUPSI**". Namun, dari 5 (lima) unsur/ indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan indeks terendah, yaitu indikator permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku dan percaloan/ perantara. Terhadap indikator dengan nilai tertinggi agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara terhadap indikator dengan nilai terendah agar tetap dipantau dan lebih ditingkatkan lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
2. Surat Permohonan Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI
KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dalam rangka peningkatan pelayanan mutu dan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menunjuk kembali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - d. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Megara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 1720/KPTA.W13-A/PS.1.7/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEDUA : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Juni 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. ✓

Tembusan:

1. Yth. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Yth. Plh. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; dan
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Lampiran I : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

**PENUNJUKAN TIMSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI
KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2	Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Pengarah
4	Dr. Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
5	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua Tim
6	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.	Perencana Pertama	Penyusun Laporan
8	Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.	Perencana Muda	
9	Ihdina Sabilal Haq, S.E.I.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Surveyor
10	Eka Siti Khomariyah, S.E.	Perencana Pertama	
11	Kartika Citraning Karwendyanto, S.Pd	Petugas PTSP	
12	Novera Intan Hapsari Suwarno Putri,. S.Sos.	Petugas PTSP	

Lampiran II : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	<i>JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS</i>
1.	Pelindung	Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3.	Pengarah	a. Menyusun Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan jadwal survei; b. Menyiapkan materi <i>briefing</i> terhadap persiapan hingga pelaporan hasil survei.
4.	Ketua Tim	a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei; b. Memimpin tahapan pelaksanaan survei mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian/ pelaporan hasil survei; c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei; d. Menentukan responden; e. Melaporkan hasil kegiatan survei kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Tim b. Menyiapkan dan mengirimkan surat terkait pelaksanaan survei; c. Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan survei.

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
6.	Penyusun Laporan	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei.
7.	<i>Surveyor</i>	Menganalisis dan mengolah hasil survei.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 5869/WKPTA.W13-A/OT1.6/XII/2024
Sifat : Penting
Hal : Permintaan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024

Surabaya, 13 Desember 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

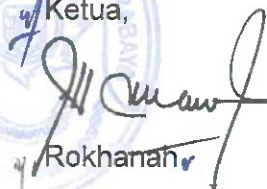
Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meminta kepada seluruh satuan kerja se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Triwulan IV (periode Oktober s.d. Desember) tahun 2024 pada aplikasi Survelag yang dapat diakses melalui alamat link <https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2024>;
2. Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdiri dari 5 (lima) orang responden yang pernah menggunakan layanan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud agar diisi secara lengkap paling lambat pada hari Rabu, tanggal **18 Desember 2024**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,


Rokhanah

Publikasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NILAI IPAK

3,94

NILAI INTERVAL KONVERSI

98,60

RESPONDEN

Jumlah : 86 orang
Jenis Kelamin : L: 63/P: 23

Pendidikan
Strata-3 : 6 orang
Strata-2 : 32 orang
Diploma IV/Strata-1 : 45 orang
Akademi/ Diploma : 1 orang
SLTA/SMA/Sederajat : 2 orang

Periode Survei Oktober s.d. Desember 2024

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR

NO	RUANG LINGKUP/INDIKATOR	NILAI	MUTU PELAYANAN
1.	<u>Diskriminasi Pelayanan</u>	3,95	<u>Bersih dari Korupsi</u>
2.	<u>Pelayanan di Luar Prosedur</u>	3,94	<u>Bersih dari Korupsi</u>
3.	<u>Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku</u>	3,93	<u>Bersih dari Korupsi</u>
4.	<u>Pungutan Liar</u>	3,97	<u>Bersih dari Korupsi</u>
5.	<u>Percaloan/ Perantara</u>	3,93	<u>Bersih dari Korupsi</u>

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA